

## **Pengelolaan Data Potensi Fiskal, Dana Transfer dan Belanja Daerah Determinasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Menggunakan Aplikasi SPSS Ver. 22**

Edi Pranoto<sup>1</sup>, Desy Diana<sup>1</sup> dan Alifah Faradilla<sup>2</sup>

<sup>(1)</sup>STMIK Jakarta STI&K

Jl. BRI No.17, Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140

<sup>(2)</sup>Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Depok, Jawa Barat 16424

{edipranoto210468, desidiana2208}@gmail.com, alifah@yahoo.com,

### **ABSTRAK**

*Tujuan Riset ini untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengeluaran Pemerintah (BD) secara parsial dan simultan berpengaruh pada Kesejahteraan Masyarakat yang diproksi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota/ Kabupaten Jawa Barat periode 2012-2016. Pengelolaan data statistik menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda melalui uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS ver.22. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable Pendapatan Asli Daerah Pemerintah (PAD), variable Dana Alokasi Umum (DAU), variable Dana Alokasi Khusus (DAK), variable Dana Bagi Hasil (DBH), variabel Belanja Daerah (BD) sebagai variable independen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variable dependen. Hasil akhir dalam Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asli, Dana Bagi Hasil (DBH) dan variable Pengeluaran Pemerintah (BD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengeluaran Pemerintah (BD) berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

**Kata Kunci :** *variabel independen, variabel dependen, kesejahteraan, SPSS*

### **PENDAHULUAN**

Data dalam suatu organisasi adalah mutlak untuk dikelola sebab pengelolaan data dalam suatu organisasi dapat membantu para penentu kebijakan. Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang sarat dengan data, selanjutnya data dalam organisasi pemerintahan ini bisa dikelola serta diolah yang selanjutnya hasil dari pengolahan data tersebut bisa digunakan oleh para penentu kebijakan pada organisasi pemerintahan tersebut. Tujuan utama didirikannya organisasi pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan pelayanan publik serta agar mempunyai daya saing. Kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan pada kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang sudah merupakan standar kesejahteraan yang dicanangkan oleh PBB (Persatuan

Bangsa-Bangsa), IPM diukur dari taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk suatu daerah. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPI). IPM dilihat berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pendapatan. IPM dapat diukur dengan menggunakan empat indikator dasar, yaitu: usia, rata-rata lamanya sekolah, angka melek huruf, dan nilai paritas daya beli. Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesejahteraan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang

dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai.

Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah diharapkan dapat berkontribusi untuk menangani masalah ini. Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan daerah, yang mana pengelolaannya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, merangsang kegiatan ekonomi dan menambah anggaran belanja serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui otonomi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

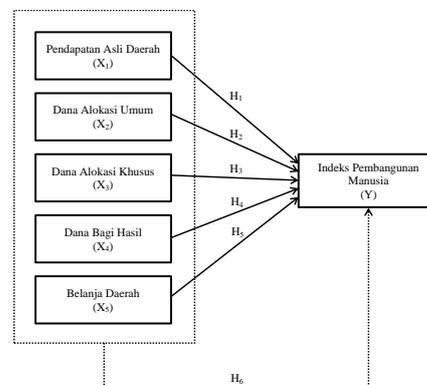
1. Menganalisis pengaruh secara parsial Potensi Fiskal yang diproksi dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016.
2. Menganalisis pengaruh secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016.
3. Menganalisis pengaruh secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016.

4. Menganalisis pengaruh secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016.
5. Menganalisis pengaruh secara parsial Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016.
6. Menganalisis pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2012-2016?

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan data secara terkomputerisasi bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah, sangat disarankan dan harus lebih dikembangkan sebab hal itu dapat mempercepat para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Obyek Penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 27. Provinsi Jawa Barat dibentuk pertama

kali pada tanggal 14 Agustus berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui *staatblad* 1924 nomor 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945, berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi delapan Provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa Barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh undang-undang No. 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 26 tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Barat. Secara administratif sejak tahun 2008, Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 Kabupaten/ Kota yang terdiri atas 17 Kabupaten dan 9 Kota. Namun pada tanggal 25 Oktober 2012 dibentuk Kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis, yaitu Kabupaten Pangandaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa besaran nilai rupiah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah (BD) serta data Indeks Pembangunan Manusia dimana data tersebut diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta data Indeks Pembangunan Manusia yang diambil dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.

### Analisis Data Deskriptif

Berdasarkan pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2012-2016, maka dapat di deskripsikan nilai minimum, maksimum, mean data dan standar deviasi variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Data Deskriptif**  
Descriptive Statistics

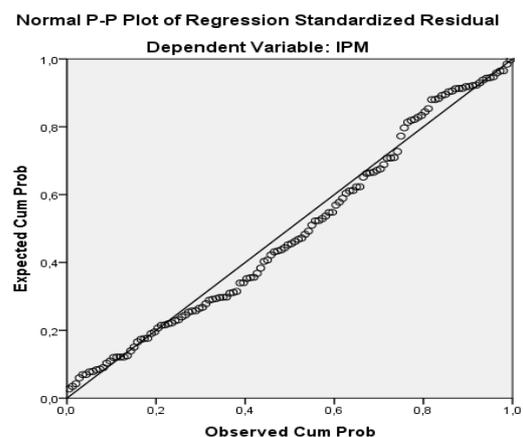
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	130	60,28	80,13	68,8305	5,05553
PAD	130	5468469064	21527557	49843340	4837179114
DAU	130	1	04962	6836,5615	08,90900
DAK	130	2818512540	21634390	11042251	4074763086
DBH	130	00	62000	17333,846	05,47170
BD	130	4570515000	64508644	13557520	1306822033
		5696	5696	3611,4230	06,61502
		4590711276	44634668	13688700	8770315697
		6	4302	0347,5923	5,01755
		5132570464	58304137	23976086	1112279888
		92	19644	32199,200	536,13090
				0	

Sumber: Data diolah, 2018

### Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk sampel dengan jumlah yang kecil.

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.



Gambar 2. Grafik Plot

Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi uji asumsi klasik. Uji normalitas melalui grafik dapat menyebabkan jika tidak berhati-hati secara visual maka akan terlihat normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara uji *one sample test kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

**Tabel 2.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandarized Residual
N		130
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,1843222
		8
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,069
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 <sup>c</sup>

Sumber : Data diolah, 2018

Nilai K-S 0,073 dengan probabilitas 0,083 dengan nilai lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dikatakan data telah terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance value* diatas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009: 28). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas Coefficient

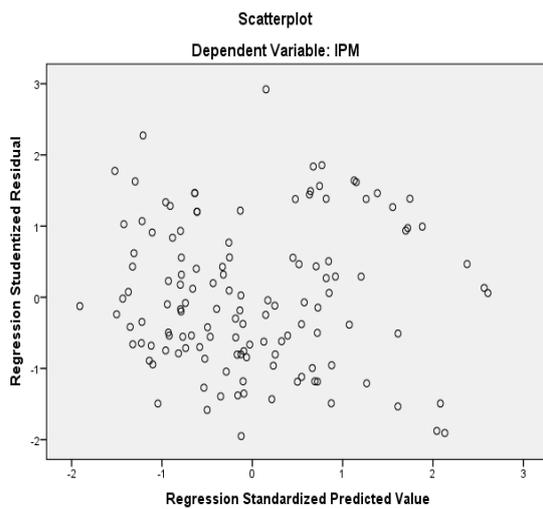
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,139	7,168
DAU	,179	2,681
DAK	,480	2,082
DBH	,550	1,819
BD	,136	7,911

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai Tolerance diatas 0,10 (PAD 0,139), (DAU 0,179), (DAK 0,480), (DBH 0,550), (BD 0,136) Sedangkan untuk nilai VIF masing-masing variabel independen lebih kecil dari nilai 10 (PAD 7,168), (DAU 2,681), (DAK 2,082), (DBH 1,819), (BD 7,911) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel bebas (independen). Sehingga model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual (*error*) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2009:35) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas antara lain dengan melihat pada *scatterplot* ada tidaknya pola antara SRESID dengan ZPRED. Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ), dan Belanja Daerah ( $X_5$ ) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan pada hasil uji asumsi klasik yang telah dijelaskan, diketahui bahwa data dalam penelitian telah terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data yang tersedia dalam penelitian telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	68,853	1,091		36,986	,000
PAD	4,251E-5	,000	,414	2,818	,006
DAU	1,688E-6	,000	-,139	-5,825	,132
DAK	3,049E-6	,000	-,159	-2,012	,146
DBH	8,746E-5	,000	,309	4,171	,020
BD	8,739E-6	,000	,039	3,582	,011

a. Dependent Variable: IPM  
Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel 4 diperoleh persamaan regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

$$IPM = 68,853 + 0,0000425 PAD - 0,000001688 DAU - 0,000003049 DAK + 0,00008746 DBH + 0,000008739 BD + e$$

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square* maka semakin baik model regresi yang digunakan karena hal itu berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar, begitu pula sebaliknya. Dibawah ini adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,791 <sup>a</sup>	,626	,611

a. Predictors: (Constant), BD, DAK, DBH, PAD, DAU

b. Dependent Variable: IPM  
Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,611 atau 61,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen PAD, DAU, DAK, DBH, BD terhadap variabel dependen IPM yaitu adalah sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

#### Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menguji penelitian ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	68,853	1,091		36,986	,000
PAD	4,251E-5	,000	,414	2,818	,006
DAU	-1,688E-6	,000	-,139	-5,825	,132
DAK	-3,049E-6	,000	-,159	-2,012	,146
DBH	8,746E-5	,000	,309	4,171	,020
BD	8,739E-6	,000	,039	3,582	,011

a. Dependent Variable: IPM  
Sumber: Data diolah, 2018

#### Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas atau variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menguji penelitian ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,341	5	1,468	41,539	,012 <sup>*</sup>
	Residual	4,383	124	,035		
	Total	11,724	129			

a. Dependent Variable: IPM  
b. Predictors: (Constant), BD, DAK, DBH, PAD, DAU  
Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.9 didapat nilai F hitung sebesar 41,539 dengan probabilitas 0,012. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka bahwa H<sub>0</sub> diterima, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### Hasil Uji Hipotesis

Setelah melakukan beberapa pengujian maka hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Persamaan	Signifikan Level	Signifikan T/F	Hasil Uji Hipotesis	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	< 0,05	0,006	Terima H <sub>1</sub> dan Tolak H <sub>0</sub>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H <sub>2</sub>	Dana Alokasi Umum (DAU) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	≥ 0,05	0,132	Tolak H <sub>2</sub> dan Terima H <sub>0</sub>	Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H <sub>3</sub>	Dana Alokasi Khusus (DAK) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	≥ 0,05	0,146	Tolak H <sub>3</sub> dan Terima H <sub>0</sub>	Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hipo tesis	Persamaan	Signi fikan Leve l	Signi fikan T/F	Hasil Uji Hipo tesis	Kesimpulan
H <sub>4</sub>	Dana Bagi Hasil (DBH) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	< 0,05	0,02 0	Teri ma H <sub>4</sub> dan Tola k H <sub>0</sub>	Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H <sub>5</sub>	Belanja Daerah (BD) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	< 0,05	0,01 1	Teri ma H <sub>4</sub> dan Tola k H <sub>0</sub>	Belanja Daerah (BD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
H <sub>6</sub>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Daerah (BD) → Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	< 0,05	0,01 2	Teri ma H <sub>6</sub> dan Tola k H <sub>0</sub>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber : Data diolah, 2018

### Analisis Verifikatif

#### Hipotesis 1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil uji t untuk variabel PAD didapat nilai signifikansinya 0,006 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha=0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh

Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) dan Sarkoro dan Zulfikar (2016). PAD merupakan gambaran umum bagaimana sebuah daerah mampu mengelola keuangannya sendiri, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mengelola kekayaan yang dimiliki. Dapat dilihat bahwa PAD di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. PAD sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pertumbuhan dan pembangunan di setiap provinsi, sesuai dengan konsep otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan menggali sumber-sumber kekayaan daerah untuk membiayai belanja daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat sudah memaksimalkan PAD-nya untuk kegiatan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sudah mampu untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerahnya.

#### Hipotesis 2: Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil uji t untuk variabel DAU didapat nilai signifikansinya 0,132 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini disebabkan karena DAU digunakan untuk belanja modal bukan untuk belanja pegawai karena komponen utama yang mendominasi DAU seharusnya merupakan komponen alokasi dasar, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran

yang digunakan untuk belanja pegawai. Dalam hal ini belanja pegawai dapat mempengaruhi IPM melalui pengalokasian yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pegawai berupa belanja tenaga kesehatan dan pengajar. Ini membuktikan bahwa DAU mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat walaupun dengan kontribusi yang kecil. Tolak ukur dari keberhasilan penggunaan DAU sangat bergantung padasejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dengan bijak sehingga sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dari tiap-tiap daerah.

**Hipotesis 3: Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil uji t untuk variabel DAK didapat nilai signifikansinya 0,146 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap IPM disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara DAK lebih diperuntukkan kepada peningkatan sarana dan prasarana (fisik) dan jumlah DAK jauh lebih kecil dibandingkan dana lainnya, seperti PAD dan DAU. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan Harahap (2011) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Hipotesis 4: Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil uji t untuk variabel DBH didapat nilai signifikansinya 0,020 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusreni dan Suhab (2009) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DBH merupakan bagian dari sumber penerimaan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri sama dengan PAD. Dana Bagi Hasil bersumber dari dana bagi hasil dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dengan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, DBH merupakan bantuan yang bersifat blok, artinya penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas daerah dan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat (Hermawan, 2007:20). Oleh karena itu dengan DBH diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk pembangunan daerahnya sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

**Hipotesis 5: Belanja Daerah (BD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Belanja Daerah (BD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil uji t untuk variabel BD didapat nilai signifikansinya 0,011 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah (BD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh

Setyowati dan Suparwati (2012) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Hipotesis 6: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa nilai signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikansi tersebut bernilai  $< 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_0$  ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**PENUTUP**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diwakili oleh lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 130 data daerah yang menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2012-2016 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda baik secara parsial (Uji t) maupun bersama-sama (Uji F) maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016.
2. Secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016.
3. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016.

4. Secara parsial, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016.
5. Secara parsial, Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016.
6. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- [2] Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2012-2016. <http://www.bps.go.id>. diakses tanggal 23 April 2018.
- [3] Badrudin, R dan Khasanah M, "Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No.1. April 2011 : 23-30
- [4] Bastian, I, "Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia" Yogyakarta: BPFE, 2006.
- [5] Darise, N. "Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta: PT Indeks. 2009.
- [6] Djaenuri, A. "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah". Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- [7] Ghozali, I. "Ekonometrika, Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
- [8] Hakim, A. "Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi & Bisnis" Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- [9] Halim, A dan Syam, K. "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan

- Daerah“ Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- [10] Harahap, R.U. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatra Utara“. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.11 No.1. Maret 2011, 2011.
- [11] Husein, Umar. “Metode Penelitian“. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- [12] Kusumastuti, A.L. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur“. Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2012, 2012.
- [13] Lugastoro, D.P. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur“. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 2013.
- [14] Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik“. Yogyakarta: Andi Offset. 2009.
- [15] Maryati, Ulfi, dan Endarwati. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)“. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 5 No. 2 ISSN 1858-3687 hal. 68-84. 2010.
- [16] Mahmudi. “Manajemen Keuangan Daerah“. Jakarta: Erlangga. 2010.
- [17] Nataluddin, N., dan Yulianti. “Manajemen Keuangan Daerah“. Yogyakarta: UPP YKPN. 2001.
- [18] Nordiawan, D., et al. “Akuntansi Pemerintah“. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- [19] Nordiawan, D. “Akuntansi Sektor Publik“. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- [20] Pratowo, N.I. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia“. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. 2012.
- [21] Priandana, S. “Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis“ Yogyakarta: Graha. 2009.
- [22] Priyatno, D. “Teknik mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian SPSS“. Yogyakarta: Gava Media. 2010.
- [23] Putra, P.G.M. dan Ulupi, I.G.K.A. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia“. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3: 836-877, 2015.
- [24] Rahyuda. “Metodologi Penelitian“. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- [25] Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah“.2004.
- [26] \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah“.2004.
- [27] \_\_\_\_\_. “Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005“
- [28] \_\_\_\_\_. “Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah“.2005.
- [29] \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah“.2009.
- [30] \_\_\_\_\_. “Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Kabupaten Dan Kota Tahun 2010“.
- [31] \_\_\_\_\_. “Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2006 tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran“.
- [32] \_\_\_\_\_. “Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah“.
- [33] \_\_\_\_\_. “Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah“.
- [34] \_\_\_\_\_. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa“.
- [35] Sanggelorang, S.M.M.V.A.R. dan Hanly F.D.J.S. “Pengaruh Pengeluaran

- Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara“. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No.02. 2015.
- [36] Santoso, Singgih. “Panduan Lengkap SPSS Versi 20“. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.
- [37] Sarkoro, H dan Zulfikar. “Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014) “. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.
- [38] Setyowati, L dan Suparwati, Y.K. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dau, Dak, Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening“. Prestasi Vol.9 No.1. 2012.
- [39] Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D“, Bandung : Alfabeta. 2009.
- [40] Widyaningsih, V.A. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah“. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- [41] Wijaya, Toni. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta“. Modus 19(2). 2007.
- [42] [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). di akses tanggal 23April 2018.
- [43] [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id). di akses tanggal 23April 2018